



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROY RIADY, SH. MH ✓
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. YULIANTO, S.H., M.H. ✓
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN

(Dr. YULIANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,

(ROY RIADY, SH. MH)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	90%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	95%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.513.816.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 11.175.528.000
Jumlah		Rp 13.689.344.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Palembang, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN

(Dr. YULIANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,

(ROY RIADY, SH. MH)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H., M.H

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. YULIANTO, SH., M.H

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN,

(Dr. YULIANTO, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,

(AKA KURNIAWAN, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industry kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Sistem Penuntutan	Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	90%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian kerugian Negara melalui Jalur Pidana dan Perdata	95%
4	Menguatnya Tata kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Pengcakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.513.816.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.175.528.000
Jumlah		Rp. 13.689.344.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Palembang, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN,

(Dr. YULIANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,

(AKA KURNIAWAN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ASRONI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,


AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA NUSANTARA 303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,


M. ASRONI, S.H
SENA WIRA NIP. 198006132005011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	100%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	30.000.000
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.184.028.000
3	Layanan Perkantoran	2.751.500.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	210.000.000
Jumlah		11.175.528.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,

AKA M. BINTA W., S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,

M. ASRONI, S.H.
SENA WIRA NIP. 198006132005011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
JAKSA MUDA NIP. 198408052002121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	bidang ekonomi dan keuangan	90%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	90%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pencarian DPO	30.000.000
2	Operasi Intelijen LID/PAM/GAL	40.000.000
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	58.008.000
4	Kampanye Anti Korupsi	20.000.000
5	Penerangan Hukum	38.976.000
6	Jaksa Menyapa	24.400.000
7	Jaksa Masuk Sekolah	28.000.000
Jumlah		239.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H., M.H.
JAKSA MUDA NIP. 198408052002121004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MAJLIS NIP. 198303182007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 199005142014031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	95%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	95%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	95%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	92%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	98%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan Tidak Pidana Umum	65.980.000
2	Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	1.263.810.000
3	Tahap Eksekusi	51.000.000
4	Restorative Justice	12.352.000
Jumlah		1.393.142.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA MURTHA RIZKI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 198303112007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 199005142014031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRMANSYAH, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,

AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

FIRMANSYAH, S.H
JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	95%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	90%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	90%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	90%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	-
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	-
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	-

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan Tindak Pidana Khusus / Korupsi	92.082.000
2	Penyidikan Tindak Pidana Khusus/ Korupsi	206.000.000
3	Pra penuntutan Perkara Pidana Khusus/ Korupsi	141.728.000
4	Dukungan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi	11.080.000
Jumlah		450.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA PURNIAWATI, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firmansyah', is written over the text of the first party.

FIRMANSYAH, S.H
JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN

SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP. 198501082005012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	89

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	30.000.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7.200.000
3	Pertimbangan Hukum	13.200.000
4	Halo JPN	6.000.000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan dana desa	24.000.000
Jumlah		80.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA KURNIAWAN, S.II., M.II
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN

SILVIANI MARGARETHA, S.II., M.II
JAKSA MUDA NIP. 198501082005012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDY, S.H.

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAAN
BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H., M.H

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 23 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN,



AKA KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN,

HENDY, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 198312252009121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	90%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	90%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/ Barang Rampasan	350.000.000
Jumlah		350.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
NEGERIMUSI BANYUASIN,



RIWAN, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 198303132007031001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB KEJAKSAAN
NEGERIMUSI BANYUASIN,

HENDY, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 198312252009121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YEYEN PRIHASTUTI.
Jabatan : KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN, TU DAN KEUANGAN & PNB
SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ASRONI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,



M. ASRONI, S.H
SENA WIRA NIP. 198006132005011006

Pihak Pertama,

KAUR KEPEGAWAIAN, TU DAN
KEUANGAN & PNB SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN,

YEYEN PRIHASTUTI
MUDA WIRA NIP. 198108172002122007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	100%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	30.000.000
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.184.028.000
3	Layanan Perkantoran	2.751.500.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	210.000.000
Jumlah		11.175.528.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,



SRONI, S.H
SENA WIRA NIP. 198006132005011006

Pihak Pertama,

KAUR KEPEGAWAIAN, TU DAN
KEUANGAN & PNPB SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN,

YEYEN PRIHASTUTI
MUDA WIRA NIP. 198108172002122007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDOYONO, S.H.
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL
DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN PADA SUB
BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ASRONI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,



M. ASRONI, S.H.
WIRA NIP. 198006132005011006

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN, DASKRIMTI
& PERPUSTAKAAN SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN,

HANDOYONO, S.H.
YUANA WIRA NIP. 199206282014031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	100%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	30.000.000
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.184.028.000
3	Layanan Perkantoran	2.751.500.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	210.000.000
Jumlah		11.175.528.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,



M. ASRONI, S.H
SENA WIRA NIP. 198006132005011006

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN, DASKRIMTI
& PERPUSTAKAAN SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN,

HANDOYONO, S.H.
YUANA WIRA NIP. 199206282014031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARIYANTO WIDJAJA, S.H
Jabatan : KASUBSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN KEAMANAN, SOSBUD, KEMASYARAKATAN, TI, PRODUKSI INTELIJEN & PENERANGAN HUKUM INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
JAKSA MUDA NIP. 198408052002121004

Pihak Pertama,

KASUBSI IDPOL, PERTAHANAN
KEAMANAN, SOSBUD, KEMASYARAKATAN
, TI, PRODUKSI INTELIJEN & PENERANGAN
HUKUM INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN

HARIYANTO WIDJAJA, S.H
AJUN JAKSA NIP. 199606082019021004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	bidang ekonomi dan keuangan	90%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	90%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pencarian DPO	30.000.000
2	Operasi Intelijen LID/PAM/GAL	40.000.000
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	58.008.000
4	Kampanye Anti Korupsi	20.000.000
5	Penerangan Hukum	38.976.000
6	Jaksa Menyapa	24.400.000
7	Jaksa Masuk Sekolah	28.000.000
Jumlah		239.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
JAKSA MUDA NIP. 198408052002121004

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Pertama,

KASUBSI IDPOL, PERTAHANAN
KEAMANAN, SOSBUD, KEMASYARAKATAN
, TI, PRODUKSI INTELIJEN & PENERANGAN
HUKUM INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Haryanto Widjaja, is written over the text of the first party.

HARYANTO WIDJAJA, S.H
AJUN JAKSA NIP. 199606082019021004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEHAVRE ABETO HUTASUHUT, S.H., M.H.
Jabatan : KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN STRATEGIS INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN


ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
JAKSA MUDA NIP. 198408052002121004

KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN DAN
PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN


LEHAVRE ABETO HUTASUHUT, S.H., M.H.
AJUN JAKSA NIP. 199311112018011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	bidang ekonomi dan keuangan	90%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	90%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pencarian DPO	30.000.000
2	Operasi Intelijen LID/PAM/GAL	40.000.000
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	58.008.000
4	Kampanye Anti Korupsi	20.000.000
5	Penerangan Hukum	38.976.000
6	Jaksa Menyapa	24.400.000
7	Jaksa Masuk Sekolah	28.000.000
Jumlah		239.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Pertama,

KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN DAN
PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal line and a small loop.

LEHAVRE ABETO HUTASUHUT, S.H., M.H.
AJUN JAKSA NIP. 199311112018011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSUBSEKSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H, M.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 199005142014031002

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

HENDRA, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199012032018011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	95%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	95%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	95%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	92%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	98%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan Tidak Pidana Umum	65.980.000
2	Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	1.263.810.000
3	Tahap Eksekusi	51.000.000
4	Restorative Justice	12.352.000
Jumlah		1.393.142.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



DIDI ADITYA RUSTANTO, S.II, M.II.
JAKSA PRATAMA NIP. 199005142014031002

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

HENDRA, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199012032018011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MICHAEL ESLO SIPAYUNG, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 16 Juni 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 199005142014031002

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

MICHAEL ESLO SIPAYUNG, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199609292020121019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	95%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	95%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	95%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	92%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	98%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan Tidak Pidana Umum	65.980.000
2	Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	1.263.810.000
3	Tahap Eksekusi	51.000.000
4	Restorative Justice	12.352.000
Jumlah		1.393.142.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 16 Juni 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



DINDA JULIA PRATIYANTO, S.H. M.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 199005142014031002

MICHAEL ESLO SIPAYUNG, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199609292020121019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DHUAN PRATITA RACHMAN, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRMANSYAH, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN


FIRMANSYAH, S.H
JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN


DHUAN PRATITA RACHMAN, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199412152020121008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	95%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	90%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	90%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	90%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	-
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	-
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	-

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan Tindak Pidana Khusus / Korupsi	92.082.000
2	Penyidikan Tindak Pidana Khusus/ Korupsi	206.000.000
3	Pra penuntutan Perkara Pidana Khusus/ Korupsi	141.728.000
4	Dukungan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi	11.080.000
Jumlah		450.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN



FIRMAN MUSAHAH, S.H
JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002

DHUAN PRATITA RACHMAN, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199412152020121008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DHEA OINA SAVITRI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA
DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRMANSYAH, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN UPAYA
HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN



FIRMANSYAH, S.H
JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002

DHEA OINA SAVITRI, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199705042019022003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	95%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	90%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	90%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	90%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	-
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	-
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	-

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan Tindak Pidana Khusus / Korupsi	92.082.000
2	Penyidikan Tindak Pidana Khusus/ Korupsi	206.000.000
3	Pra penuntutan Perkara Pidana Khusus/ Korupsi	141.728.000
4	Dukungan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi	11.080.000
Jumlah		450.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN UPAYA
HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN



FAIRAL BINTI YAH, S.H
JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002

DHEA OINA SAVITRI, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199705042019022003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMLI AZIZ SEMENDAWAI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

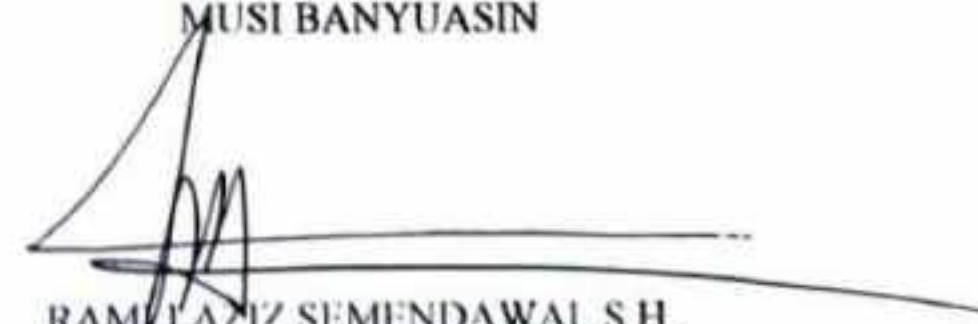
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN


SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP.198501082005012001

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN


RAMLI AZIZ SEMENDAWAI, S.H.
AJUN JAKSA MADYA NIP.199206132020121018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	89

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	30.000.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7.200.000
3	Pertimbangan Hukum	13.200.000
4	Halo JPN	6.000.000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan dana desa	24.000.000
Jumlah		80.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

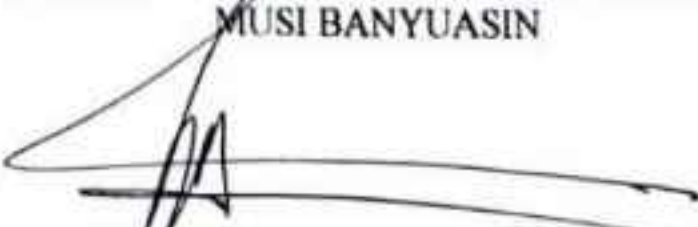
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



MARGARETHA, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP. 198501082005012001

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN



RAMLI AZIZ SEMENDAWAI, S.H.
AJUN JAKSA MADYA NIP.199206132020121018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA ASTRADA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
BANYUASIN



SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP. 198501082005012001

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN

HENDRA ASTRADA, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199510172020121014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	89

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	30.000.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7.200.000
3	Pertimbangan Hukum	13.200.000
4	Halo JPN	6.000.000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan dana desa	24.000.000
Jumlah		80.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN



SILVIANUS M. CARETUA, S.H., M.H
JAKSA MUDA NIP. 198501082005012001

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN

HENDRA ASTRADA, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199510172020121014